

**PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2019 - 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. JEND. SUDIRMAN NO.18 TELEPON (0532) 21195



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN T A H U N 2019 – 2022



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAB. KTW. BARAT

KAB. KTW. BARAT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN (RENSTRA PERUBAHAN-SKPD)
TAHUN 2019 - 2022**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Pangkalan Bun, September 2019

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat TuhanYang Maha Esa, telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Tim Penyusun sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra PD) Perubahan berdasarkan hasil Reviu RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022.

Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ini menguraikan tentang latar belakang yang dikemukakan secara ringkas mengenai pengertian Renstra; fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan dengan Renja SKPD; landasan hukum serta tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat; tujuan; sasaran dan indikator sasaran serta target yang dilaksanakan dalam sisa kurun waktu 3 (tiga) Tahun

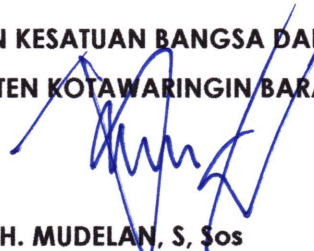
Dengan tersusunnya Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ini diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 yang lebih akuntabel.

Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dan kebijakan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat.

Semoga Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, September 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



**H. MUDELAN, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19600215 198203 1 013**

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1. Pengertian Rencana Strategis Perubahan	1
1.1.2. Fungsi Renstra Perubahan	1
1.1.3. Proses Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2
1.1.4. Keterkaitan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan dokumen-dokumen Perencanaan lainnya	3
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	9
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	9
2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	9
2.1.2 Struktur Organisasi	11
2.2 Sumber Daya SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	13
2.2.1 Sumber Daya Manusia	13
2.2.2 Sarana dan Prasarana	14
2.2.3 Keuangan	15
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	23
2.3.1 Kegiatan Pembinaan Partai Politik	23
2.3.2 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	23
2.4 Tantangan dan Peluang	25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26
3.1.1 Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	26
3.1.2 Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	26
3.1.3 Bidang Politik Dalam Negeri	26
3.1.4 Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat	27

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3 Telaahan Renstra Kemendagri/Renstra Perangkat Daerah Provinsi	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	31
4.1 Tujuan	31
4.2 Sasaran	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	36
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	56
BAB VIII PENUTUP	57
8.1 Kesimpulan	57
8.2 Kaidah Pelaksanaan	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah dokumen rencana stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah hasil Reviu RPJMD Kabupaten yang menjadi acuan untuk melakukan reviu terhadap rencana stragtegis untuk sisa kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan.

Dalam Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsi selama sisa kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat juga sebagai tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahun, guna mewujudkan dan melaksanakan visi dan misi serta program Kepala Daerah.

1.1.2. Fungsi Renstra

Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat berfungsi sebagai :

- a. Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Sebagai kontrak kinerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah; dan
- e. Sebagai landasan dalam upaya mewujudkan layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.1.3. Proses Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Perubahan

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renstra Perubahan dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

- 1) Pembentukan Tim Penyusun Reviu Renstra Perubahan
- 2) Orientasi mengenai Reviu Renstra Perubahan
- 3) Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra Perubahan
- 4) Pengumpulan Data dan Informasi

b. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perubahan

Tahap penyusunan rancangan Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari dua tahap, yaitu: 1. Tahap perumusan rancangan Renstra Perubahan ; dan 2. Tahap penyajian rancangan Renstra Perubahan.

1) Tahap Perumusan Rancangan Renstra Perubahan

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra Perubahan sangat menentukan kualitas dokumen Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan dalam menyusun rancangan Renstra Perubahan adalah Rancangan RPJMD Perubahan yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama sisa kurun waktu 3 (tiga) tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2) Tahap Penyajian Rancangan Renstra Perubahan

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah diskusikan dan diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sesuai dengan sistematika penulisan.

1.1.4. Keterkaitan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

a. Keterkaitan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai dokumen perencanaan selama sisa kurun waktu 3 (tiga) tahun :

- 1) Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai dokumen teknis dalam penjabaran RPJMD Perubahan.
- 2) Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang memuat arah Kebijakan Teknis serta rencana program setiap bidang kewenangan dan tugas serta fungsi pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh SKPD dan berkoordinasi dengan BAPPEDA.

b. Keterkaitan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan dan merupakan kompilasi rencana kerja setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 6. Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP.
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025
 9. Peraturan Daerah Nomor tentang Perubahan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2022.
 10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama
 11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor..... Tahun Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Perubahan (Renstra Perubahan) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai dasar bagi semua stakeholder Kesatuan Bangsa dan Politik dan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan selama sisa kurun waktu 3 (tahun) tahun.

Tujuan Penyusunan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dimasa lalu dan masa Renstra 2 (dua) tahun yang telah berjalan, permasalahan dan isu strategis, sasaran strategis dan bagaimana upaya pencapaiannya dalam 3 (tiga) tahun kedepan;

2. Sebagai panduan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkelanjutan;
3. Sebagai instrumen bagi pihak-pihak yang bertugas melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi program dan kegiatan;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Polittik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak bab ini menjelaskan secara ringkas pengertian Renstra SKPD Perubahan, fungsi Renstra SKPD Perubahan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD Perubahan, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, dengan Renstra K/L, dengan Renstra provinsi, dan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Anak bab ini memuat penjelasan tentang UU, PP, Perda, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur: tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan SKPD, untuk dijadikan pedoman maupun acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Anak bab ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Anak bab ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perubahan , serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dalam bab ini memuat informasi tentang (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, menguraikan secara ringkas sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, menjelaskan hasil capaian melalui pelaksanaan Renstra SKPD Perubahan, capaian program prioritas SKPD melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan menjelaskan hambatan dan atau kendala utama yang dihadapi, dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perubahan ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra Perubahan Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD tiga tahun kedepan. Pada bagian ini juga menjelaskan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

3.3 Telaahan Renstra K/L Dalam Negeri

Bagian ini menjelaskan apa saja faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L maupun Renstra Perangkat Daerah provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini menjelaskan apa saja faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan SKPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam sisa kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja utama SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam sisa kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

2.2.1 Dasar Hukum Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Selanjutnya pada Tahun 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami perubahan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Fungsi

Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis;
- 4) Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 5) Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

- 6) Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- 7) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Kewenangan

Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi, penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan nilai-nilai sejarah ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila dan Karakter Bangsa;
- 2) Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan penanganan Konflik, Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Deteksi Dini, Pengembangan SDM di Bidang Intelijen, Bina Masyarakat, Perbatasan dan Tenaga kerja, Penanganan Konflik Pemerintahan, Konflik Sosial, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
- 3) Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan serta pembinaan penyelenggaraan ketahanan di bidang seni, budaya, fasilitasi dan koordinasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan, Pembauran Akulturasi Budaya, Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Masalah Penyakit Masyarakat dan Sosial Kemasyarakatan;
- 4) Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
- 5) Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan, perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan, kebijakan ormas dan perekonomian.

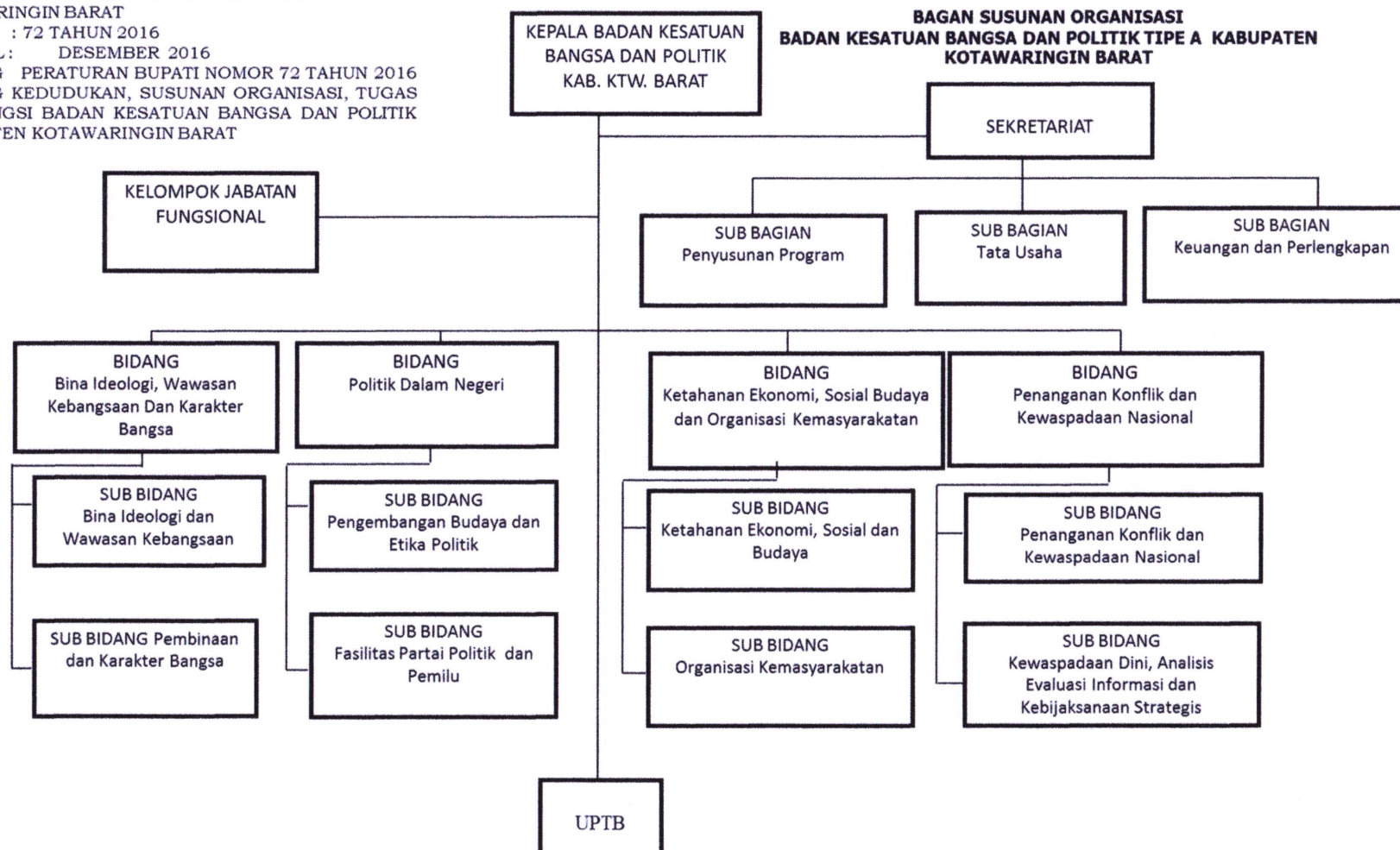
2.2.2 Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; dan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat; dan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 300/7/Kesbang.l/2017 Tanggal, 6 Pebruari 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, maka struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri atas :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Kepala Bidang terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari :
 - 1). Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2). Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa
 - b. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :
 - 1). Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
 - 2). Kepala Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu.
 - c. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :
 - 1). Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - 2). Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - d. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional terdiri dari :
 - 1). Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik; dan
 - 2). Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 72 TAHUN 2016
TANGGAL : DESEMBER 2016
TENTANG PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



2.2. Sumber Daya SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber daya SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya SKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat diklasifikasikan kedalam jenjang pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan jenjang paling tinggi yaitu jenjang Sarjana dan Pasca Sarjana (S2). Komposisi ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S-2	1	-	1
2	S-1	14	3	17
3	D-3	-	1	1
4	SMA/Sederajat	3	2	5
5	SMP/Sederajat	1	1	2
Total		19	7	26

Dari jumlah 26 orang komposisi ASN berdasarkan kualifikasi pangkat dan golongan diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat / Golongan

No	Pangkat / Golongan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	I/d	0	0	0
2	II/a	1	0	1
3	II/b	0	0	0
4	II/c	1	1	2
5	II/d	1	2	3
6	III/a	1	0	1
7	III/b	0	0	0
8	III/c	5	2	7
9	III/d	6	1	7
10	IV/a	2	1	2
11	IV/b	1	0	3
12	IV/c	1	0	1
Total		19	7	26

Komposisi ASN berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tabel berikut :

Tabel Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan
Struktural dan Fungsional

No	Struktural dan Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Eselon II B	1	-	1
2	Eselon III A	1	-	1
3	Eselon III B	3	1	4
4	Eselon IV A	10	1	11
5	Fungsional			
Total		15	2	17

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, yang pendanaannya bersumber dari APBD adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ASET TETAP				JUMLAH ASET TETAP	
		Aset Baik		Aset Kurang Baik			
		Jlh Brng	Jumlah Harga	Jlh Brng	Jumlah Harga	Jlh Brng	Jumlah Harga
1.	Tanah	2	152.990.000	0	-	2	152.990.000
2.	Gedung dan Bangunan	8	1.041.209.500	0		8	1.041.209.500
3.	Alat-alat Angkutan	12	401.611.800	1	26.200.000	13	427.811.800
4.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	433	854.144.025	0	-	433	854.144.025
5.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	7	25.147.500	0	-	7	25.147.500
6.	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	3	14.780.000	0	-	3	14.780.000
7.	Jaringan	-	570.000	0	-	-	570.000
8	Buku dan Perpustakaan	28	5.074.100	0	-	28	5.074.100
9	Barang Bercorak Kebudayaan	4	1.200.000	0	-	4	1.200.000
10	Hewan dan Ternak serta Tanaman	27	12.124.100	0	-	27	12.124.100
TOTAL		524	2.508.851.025	1	26.200.000	525	2.535.051.025

Tabel Sumber Daya Berupa Sarana dan Prasarana

2.2.3 Keuangan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas perlu didukung dengan anggaran yang memadai, sehingga sasaran dan target baik program maupun kegiatan dapat tercapai secara maksimal. Anggaran yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat hanya bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat. Berikut pagu anggaran yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 (lima) tahun periode 2012-2016 sebagai berikut :

Tabel Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Dari Tahun 2012- 2016

No	Tahun	Pagu		Total Pagu Per Tahun
		BTL	BL	
1	2012	2.115.390.000,-	3.450.944.000,-	5.566.334.000,-
2	2013	2.143.225.000,-	3.384.983.000,-	5.528.208.000,-
3	2014	2.388.126.000,-	5.535.347.000,-	7.923.473.000,-
4	2015	2.665.814.000,-	4.475.238.400,-	7.141.052.400,-
5	2016	2.996.383.000,-	4.004.263.000,-	7.000.646.000,-

**Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	IKK	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
			Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan																
	tersedianya tenaga linmas		-	1126 Org	-	-	-	-	-	1126 Org		1120 Org	-	-	1126 Org		1120 Org
	tersedianya tenaga linmas kabupaten		-	-	100 Org	-	-	-	100 org	1126 Org	1120 Org	1120 Org	-	100 org	1126 Org	1126 Org	1120 Org
	tersedianya insentif tenaga linmas (Pamsung Pemilu)		-	-	1226 Org	-	1226 Org	-					-				
	terlaksananya pembangunan pos jaga/ronda		4 Buah	8 Buah	11 Buah	11 Buah	11 Buah	4 unit	2 unit	8 unit	4 unit	8 unit	4 unit	2 unit	8 unit	4 unit	8 unit
	tersedianya peralatan pos jaga/ronda		-	8 Buah	11 Buah	11 Buah	11 Buah	-					-				
	terlaksananya pelatihan dasar linmas		-	613 Org	-	613 Org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	tersedianya pakaian linmas		-	1226 Stel	-	-	-	-	-	1184 stel	-	-	-	-	1184 stel	-	-
	terlaksananya penyuluhan pengelola sarang burung walet, hotel dan losmen		-	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	terlaksananya lomba pos kamling		-	6 Pos	6 Pos	6 Pos	6 Pos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Tersedianya data yang akurat		2 Kec	6 Buku	6 Buku	6 Buku	6 Buku	2 Kec	-		-	-	2 Kec	-		-	-
II	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal																
	terlaksananya kerjasama dengan aparat keamanan		6 Kec.	6 Kec.	6 Kec.	6 Kec.	6 Kec.	6 Kec.	6 Kec.	6 Kec.		6 Kec.	6 Kec.	6 Kec.	6 Kec.		6 Kec.
	tersedianya insentif jaringan informasi keamanan (Informan)		-	40 Org	40 Org	40 Org	40 Org	1000 org	50 org	1050 org	50 org	50 org	1000 org	50 org	1050 org	50 org	50 org
	tersedianya insentif posko keamanan		-	10 Org	10 Org	10 Org	10 Org		11 org	12 org	12 org	12 org		11 org	12 org	12 org	12 org
III	Program pengembangan wawasan kebangsaan																
	terlaksananya penyuluhan peningkatan hubungan antar umat beragama		90 Org	90 Org	90 Org	90 Org	90 Org	90 Org	90 Org	-	-	-	90 Org	90 Org	-	-	-
	terlaksananya sosialisasi bela negara		-	90 Org	90 Org	90 Org	90 Org	-	-	220 org	300 org	200 org	-	-	220 org	300 org	200 org
	terlaksananya pelestarian seni dan budaya bangsa		-	90 Org	90 Org	90 Org	90 Org	-	1200 org	80 Org	80 Org	40 org	-	1200 org	80 Org	80 Org	40 org
IV	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan																
	terbinanya hubungan antar forum-forum keagamaan antara lain : FKUB, FBN, FKDM, FPK dan Kominda		5 Forum	5 Forum	5 Forum	5 Forum	5 Forum	5 Forum	4 Forum	4 Forum	3 Forum	3 Forum	5 Forum	4 Forum	4 Forum	3 Forum	3 Forum
	terlaksananya desiminasi SK tiga menteri		75 Org	50 Org	50 Org	50 Org	50 Org	75 Org	50 Org	200 Org	300 org	54 org	75 Org	50 Org	200 Org	300 org	54 org

V	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)																
	terlaksananya penyuluhan/penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang peraturan daerah mengenai bahaya peredaran/penggunaan miras dan narkoba		50 Org	80 Org	100 Org	100 Org	100 Org	50 Org	50 Org	400 Org	300 org	-	50 Org	50 Org	400 Org	300 org	-
	terlaksananya penyuluhan pencegahan bahaya praktek prostitusi		-	80 Org	50 Org	50 Org	50 Org	-	40 Org	100 Org	-	400 Org	-	40 Org	100 Org	-	400 Org
	Tersedianya data yang akurat		-	6 Buku	6 Buku	6 Buku	6 Buku	-	5 Buku	-	-	10 buku	-	5 Buku	-	-	10 buku
VI	Program pendidikan politik masyarakat																
	terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat	100 %	60 Org	360 Org	360 Org	360 Org	360 Org	60 Org	360 Org	70 org	570 org	150 org	60 Org	360 Org	70 org	570 org	150 org
	terwujudnya persatuan antar parpol, ormas/LSM dan generasi muda	20 %	100 Org	100 Org	100 Org	150 Org	150 Org	38 parpol /102 ormas/ LSM	20 parpol/50 ormas/LSM	12 parpol/70 ormas/LSM	12 parpol/40 ormas/LSM	12 parpol/40 ormas/LSM	38 parpol/102 ormas/LSM	20 parpol/50 ormas/LSM	12 parpol/70 ormas/LSM	12 parpol/40 ormas/LSM	12 parpol/40 ormas/LSM
	tersedianya data base partai politik dan Ormas/LSM		-	10 Buku	10 Buku	10 Buku	10 Buku	-	10 Buku	-	20 Buku	-	-	10 Buku	-	20 Buku	-
	Tersedianya data yang akurat		6 Kec.	6 Kec.	6 Kec.	6 Kec.	6 Kec.	6 Kec.	6 Kec.	-	6 Kec.	6 Kec.	6 Kec.	6 Kec.	-	6 Kec.	6 Kec.
VII	Program pencegahan dan penanggulangan korban bencana alam																
	terlaksananya penyuluhan dalam penanggulangan bencana		-	120 Org	150 Org	80 Org	80 Org	140 Org	30 Org	100 Org	100 Org	-	140 Org	30 Org	100 Org	100 Org	-

Tabel Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Kotawaringin Barat didapati beberapa indikator kinerja yang telah memenuhi target dan belum memenuhi target.

A. Capaian kinerja yang tidak memenuhi target :

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1. Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan
2. Kegiatan lomba pos jaga/ronda
3. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Ketiga kegiatan diatas untuk capaian kinerja SKPD belum dapat memenuhi target kinerja disebabkan keterbatasan anggaran yang tersedia.

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Untuk kegiatan ini capaian kinerjanya belum memenuhi target dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga untuk pelaksanaan kegiatan ini dijadikan satu (merger) dengan kegiatan Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)

1. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Untuk kegiatan ini capaian kinerjanya belum memenuhi target dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dijadikan satu (merger) dengan kegiatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) lainnya dalam satu program.

Program Pendidikan Politik Masyarakat

1. Penyusunan data base partai politik

Untuk kegiatan ini capaian kinerjanya belum memenuhi target dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga untuk pelaksanaan kegiatan dijadikan satu (merger) dengan kegiatan forum-forum diskusi politik sehingga kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan 2 tahun berjalan Renstra 2012-2016.

B. Capaian kinerja yang memenuhi target :

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal.

1. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Untuk kegiatan pada Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal hampir setiap tahun anggaran dapat memenuhi target, dikarenakan kegiatan ini bersifat kemitraan dengan aparat keamanan daerah (vertikal) dan menjadi salah satu program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Program pendidikan politik masyarakat

1. Penyuluhan kepada masyarakat
2. Forum-forum diskusi politik

Untuk 2 (dua) kegiatan diatas dapat dikategorikan memenuhi target dalam setiap tahun pelaksanaannya, dikarenakan kegiatan tersebut merupakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memfasilitasi dalam meningkatkan pemahaman politik masyarakat.

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1. Peningkatan rasa solidaritas ikatan sosial dikalangan masyarakat
2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1. Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
2. Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Untuk 4 (empat) dari 2 (dua) program diatas dapat dikategorikan memenuhi target dalam setiap tahun pelaksanaannya, dikarenakan kegiatan tersebut merupakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memfasilitasi dalam meningkatkan ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan cinta tanah air.

TABEL PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

N O	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I	Belanja	5.566.334.000	6.541.394.000	7.923.473.000	7.141.052.400	7.000.646.000	5.219.573.56 ₁	5.851.767.645	7.401.566.35 ₃	6.038.854.123	6.777.772.693	346.760.439	689.626.355	521.906.647	1.102.198.27 ₇	222.873.307	6.834.579.880	6.257.906.875
	Belanja Tidak langsung	2.115.390.000	2.087.372.000	2.388.126.000	2.665.814.000	2.996.383.000	1.949.977.51 ₂	1.957.241.170	2.340.671.91 ₄	2.580.319.676	2.852.753.028	165.412.488	130.130.830	47.454.086	85.494.324	143.629.972	2.450.617.000	2.336.192.640
	Belanja Pegawai	2.115.390.000	2.087.372.000	2.388.126.000	2.665.814.000	2.996.383.000	1.949.977.51 ₂	1.957.241.170	2.340.671.91 ₄	2.580.319.676	2.852.753.028	165.412.488	130.130.830	47.454.086	85.494.324	143.629.972	2.450.617.000	2.336.192.640
	Gaji dan Tunjangan	1.728.144.000	1.681.337.000	1.990.315.000	2.138.262.000	2.253.443.000	1.646.482.05 ₉	1.641.442.880	1.979.294.91 ₄	2.128.609.676	2.211.878.028	81.661.941	39.894.120	11.020.086	9.652.324	41.564.972	1.958.300.200	1.921.541.511
	Tambahan Penghasilan PNS	387.246.000	406.035.000	397.811.000	527.552.000	742.940.000	303.495.453	315.798.290	361.377.000	451.710.000	640.875.000	83.750.547	90.236.710	36.434.000	75.842.000	102.065.000	492.316.800	414.651.149
II	Belanja langsung	3.450.944.000	4.454.022.000	5.535.347.000	4.475.238.400	4.004.263.000	3.269.596.04 ₉	3.894.526.475	5.060.894.43 ₉	3.458.534.447	3.925.019.665	181.347.951	559.495.525	474.452.561	1.016.703.95 ₃	79.243.335	4.383.962.880	3.921.714.215
	Belanja Pegawai	614.185.000	518.572.000	328.162.000	312.347.000	392.314.400	546.573.500	455.639.000	285.447.500	301.904.000	365.718.550	67.611.500	62.933.000	42.714.500	10.443.000	26.595.850	433.116.080	391.056.510
	Belanja Barang dan Jasa	2.428.184.000	3.442.380.003	5.066.785.000	3.938.051.400	3.494.333.600	2.327.359.54 ₉	2.961.231.475	4.647.318.43 ₉	2.934.682.447	3.449.358.815	100.824.451	481.148.528	419.466.561	1.003.368.95 ₃	44.974.785	3.673.946.801	3.263.990.145
	Belanja Modal	408.575.000	493.069.997	140.400.000	224.840.000	117.615.000	395.663.000	477.656.000	128.128.500	221.948.000	109.942.300	12.912.000	15.413.997	12.271.500	2.892.000	7.672.700	276.899.999	266.667.560

PENJELASAN TABEL ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dari lampiran tabel Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Kotawaringin Barat ada beberapa komponen belanja yang diukur melalui rasio antara realisasi dan anggaran didapati telah memenuhi target dan belum memenuhi target, antara lain sebagaiberikut :

A. Komponen belanja yang tidak memenuhi target

1. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Untuk belanja tidak langsung rasio antara realisasi dan anggaran dikategorikan masih belum memenuhi target karena selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran belum dapat terealisasi 100%, hal ini disebabkan karena jumlah pegawai yang berkurang akibat adanya pegawai yang purna/pensiun selain itu berkurangnya tunjangan kinerja pegawai setiap tahunnya akibat dari absensi pegawai (ijin, cuti dll) dan juga tunjangan anak yang sudah diluar tanggungan dalam tunjangan kinerja pegawai.

2. Belanja Langsung (BL)

➤ Belanja pegawai

Untuk belanja pegawai rasio antara realisasi dan anggaran dikategorikan masih belum memenuhi target karena selama kurun waktu 5 tahun anggaran belum dapat terealisasi 100% walaupun didalam tabel 2.1 setiap tahunnya anggaran mengalami peningkatan dalam perhitungan rasio antara realisasi dan anggaran, hal ini disebabkan kelebihan dalam penganggaran maupun sisa dari surat penyediaan dana (SPD).

➤ Belanja barang dan jasa

Untuk belanja barang dan jasa rasio antara realisasi dan anggaran dikategorikan tidak memenuhi target karena selama kurun waktu 5 tahun anggaran belum dapat terealisasi 100% dan didalam tabel diatas setiap tahunnya anggaran mengalami penurunan dalam perhitungan rasio antara realisasi dan anggaran, hal ini disebabkan kelebihan dalam penganggaran, adanya belanja barang dan jasa yang tidak terealisasi maupun sisa dari surat penyediaan dana (SPD).

B. Komponen belanja yang memenuhi target

1. Belanja Langsung (BL)

➤ Belanja modal

Untuk belanja modal rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikategorikan telah memenuhi target, rata-rata persentase anggaran yang terealisasi hampir mencapai 100% setiap tahun anggarannya, hal ini dikarenakan kebutuhan akan barang sebagai penunjang kerja.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Capaian kinerja pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan acuan tersebut terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri yaitu :

1. Kegiatan pembinaan partai politik (menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah);
2. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP).

Secara ringkas capaian kinerja pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Kotawaringin Barat sampai tahun 2016 adalah sebagai berikut :

2.3.1 Kegiatan Pembinaan Partai Politik

Kegiatan pembinaan terhadap partai politik di Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah dilakukan sampai tahun 2016 berjumlah 5 (lima) kegiatan, sedangkan target yang tertuang di Renstra Perangkat Daerah adalah 5 (lima) kegiatan. Apabila diukur persentasenya maka pencapaian kinerja pelayanan SKPD dalam kegiatan pembinaan partai politik adalah 100 %.

Memperhatikan persentase capaian kinerja pelayanan pada akhir periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut, maka kegiatan pembinaan partai politik di Kabupaten Kotawaringin Barat dinilai berhasil mencapai target dalam periode Renstra periode 2012-2016.

2.3.2 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai akhir periode Renstra berjumlah 1 (satu) sedangkan target yang tertuang di Renstra Perangkat Daerah adalah 5 (lima) kegiatan.

Apabila diukur persentasenya maka pencapaian kinerja pelayanan SKPD dalam kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 20 %, atau kurang 80 % dari target IKK pada akhir periode Renstra sebesar 100 %.

Tidak tercapainya target kinerja pelayanan pada akhir periode Renstra tersebut, disebabkan belum adanya program dan kegiatan yang secara eksplisit menangani pembinaan Ormas/LSM/OKP, sehingga untuk kegiatan pembinaan Ormas/LSM/OKP hanya ikut melekat pada program dan kegiatan yang lain dan outputnya hanya berupa rapat-rapat, minimnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan pembinaan Ormas/LSM dan OKP di Kabupaten Kotawaringin Barat, selain itu data Ormas/LSM belum ada yang valid karena aturannya masih mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1985, setelah itu terbit UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas akan tetapi implementasinya baru dimulai tahun 2014, sementara jumlah LSM, Ormas dan OKP mengalami peningkatan jumlah dari tahun ke tahun dan harus mendapatkan pembinaan. Sampai dengan tahun 2016 jumlah LSM, Ormas dan OKP di Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdaftar sebanyak 50, jumlah tersebut sudah termasuk LSM, Ormas dan OKP.

Pencapaian kinerja Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat Periode Renstra 2012 - 2016

No	Indikator	Target IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah	100%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	20%	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-

2.4. Tantangan dan Peluang

Penataan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016, dimana seluruh pegawai dituntut untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada.

Hal ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan kemauan setiap instansi pemerintah untuk terus menerus melakukan perubahan dan penyesuaian sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan organisasi tetap, berarti dan bahkan unggul.

Peran, fungsi dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini selain kegiatan fasilitasi, mediasi dan komunikasi yang telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara keseluruhan.

Berikut dikemukakan peluang dan tantangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat:

1. Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat:

- a. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang memadai dan handal di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- b. Wacana menjadikan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik menjadi urusan pusat/instansi vertikal.

2. Peluang

Peluang dalam pengembangan pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah adanya political will dari Pemerintah daerah dalam mewujudkan dan memelihara keamanan dan ketertiban umum serta kerukunan umat beragama dalam kehidupan sosial masyarakat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis. Dari permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun Rencana strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sesuai telaahan dari gambaran pelayanan SKPD, dapat dirumuskan isu-isu penting/strategis sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, beberapa hasil identifikasi permasalahan yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain sebagai berikut :

3.1.1. Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Permasalahan di bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa antara lain:

- a. Menurunnya kebanggaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional.
- b. Merosotnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dikalangan masyarakat.
- b. Terjadinya pergeseran nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat dikarenakan melupakan sejarah perjalanan perjuangan bangsa.
- c. Masih terdapatnya isu-isu yang bernuansa SARA dan tindakan diskriminatif terhadap warganegara yang bertentangan dengan hak-hak sipil sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

3.1.2. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Permasalahan di Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional antara lain :

1. Rawan terjadinya konflik antar suku karena banyaknya warga pendatang dari berbagai daerah.
2. Rendahnya kepekaan, kesiagaan dan antisipasi serta peran serta masyarakat dalam urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban.

3.1.3. Bidang Politik Dalam Negeri

Permasalahan di Bidang Politik Dalam Negeri antara lain :

1. Kurangnya pemahaman dan partisipasi politik masyarakat.
2. Kerawanan dalam proses Pilkada serentak.

3.1.4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

Permasalahan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan antara lain :

1. Masalah kelembagaan atau SOTK yang tumpang tindih antar SKPD dimana dalam hal ini tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tertuang mengurus tentang ekonomi, sosial dan budaya.
2. Kurangnya pemahaman terhadap organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2017-2022 adalah **"Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas"**.

Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan Kabupaten Kotawaringin Barat :

1. Maju pembangunan sesuai **IPTEK** dan **INFRASTRUKTUR** yang representative.
2. Masyarakat yang bermoral punya **KETAKWAAN** pada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Keberagaman masyarakat yang **HARMONIS**.
4. Interaksi dan pergaulan yang **LANGGENG**.
5. Keberadaan hidup yang **AMAN**.
6. Kehidupan masyarakat **SEJHTERA**, cukup pangan, sandang dan papan.

Adapun Misi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2017-2022 terdiri dari 6 (enam) poin sebagai berikut :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga.
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

6. Melestarikan situs budaya, kesenian local dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

Mengacu pada Visi dan Misi tersebut diatas maka Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah **"Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat serta Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenteram dan Dinamis"**.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Beberapa permasalahan dan tantangan ke depan yang masih perlu disikapi yang terkait dengan tugas Kementerian Dalam Negeri, 2 diantaranya yaitu :

1. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa, revolusi mental dan restorasi sosial budaya serta stabilitas dalam negeri, dalam rangka memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan.
2. Belum tertatanya struktur politik (suprastruktur dan infrastruktur politik), pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri, dan hubungan antar lembaga negara, dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis.

Menyikapi permasalahan tersebut maka Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: **"Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa"**.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerja yang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri yang terkait permasalahan tersebut, yaitu Misi Pertama dan Misi Kedua sebagai berikut :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

Berdasarkan telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dengan memperhatikan situasi berkembang dewasa ini permasalahan dan tantangan yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :

1. Pendidikan politik masyarakat masih rendah

Dapat dilihat dari menurunnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilukada di Kalimantan Tengah serta konflik-konflik yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilukada.

2. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun

Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan semakin maraknya conflict and communal violence (konflik dan kekerasan komunal) ditengah masyarakat, seperti tawuran antar warga dan pertentangan antar komunitas/kelompok masyarakat.

3. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat

Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan eksese-eksese negative dengan munculnya modus- modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal telaahan rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis tidak memiliki korelasi, sehingga tidak perlu dilakukan telaahan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Menyikapi permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai upaya menciptakan Pelayanan Kesbangpol yang unggul dengan maka ditetapkan isu - isu strategis SKPD sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia (aparatur) yang terbatas dalam SKPD, sehingga dapat menyebabkan kinerja yang lamban dan kurang efisien.
2. Kelembagaan atau SOTK yang tumpang tindih antar SKPD dimana dalam hal ini tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih tertuang mengurus tentang ekonomi, sosial dan budaya.

3. Komitmen seluruh *stakeholders* sebagai upaya memelihara kondisi sosial masyarakat yang aman dan kondusif serta memegang teguh nilai-nilai kebangsaan.

Tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Permasalahan	Acuan Permasalahan
1	2	3
1	Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam SKPD	Evaluasi internal
2	Kinerja aparatur yang bekerja selalu menunggu anggaran	Evaluasi internal
3	Masalah kelembagaan atau SOTK yang tumpang tindih antar SKPD	Evaluasi internal
4	Daya serap realisasi fisik dan anggaran yang lamban	Evaluasi hasil laporan bulanan (RFK)
5	Adanya wacana menjadikan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik menjadi urusan pusat/instansi vertikal	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6	Dengan adanya Mou antar pemerintah Kabupaten kotawaringin Barat dengan Kabupaten Banyuwangi kemungkinan dapat merubah pola pikir (mindset) aparatur kesbangpol untuk meningkatkan kinerja	MoU (nota kesepahaman) antar Kab.Ktw.Barat dgn Kab.Banyuwangi
7	Adanya political will dari Pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kerukunan umat beragama	Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah
8	Menurunnya kebanggaan terhadap pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional	Telaahan Renstra Kemendagri
9	Pergeseran nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat dikarenakan melupakan sejarah perjalanan perjuangan bangsa	Telaahan Renstra Kesbangpol Provinsi
10	Masih adanya isu-isu yang bernuansa SARA yg dapat menimbulkan konflik antar etnis, agama dan golongan	Telaahan Renstra Kesbangpol Provinsi
11	Adanya kerjasama dengan instansi vertikal (keamanan daerah) yang membantu badan kesbangpol dalam rangka memelihara kantrantibmas	UU No.7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik sosial dan Permendagri No. 42 tahun 2015 tentang koordinasi penanganan konflik sosial
12	Rawan terjadinya konflik antar suku karena banyaknya warga pendatang dari berbagai daerah	Telaahan Renstra Kesbangpol Provinsi
13	Kurangnya pemahaman dan partisipasi politik masyarakat	Telaahan Renstra Kesbangpol Provinsi
14	Kerawanan adanya gesekan pada pemilu dan pemilukada serentak	Telaahan Renstra Kesbangpol Provinsi
15	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Evaluasi capaian Renstra Kesbangpol periode 2012-2016
16	Adanya forum-forum binaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya	Telaahan Renstra Kesbangpol Provinsi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan hasil Reviu Renstra dan memperhatikan tantangan dan peluang serta serta isu-isu strategis yang telah ditentukan dalam bab sebelumnya, maka dirumuskan perubahan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat selama 3 (tiga) tahun ke depan yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Selain itu dari tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan juga dapat disusun pohon kinerja (*logframe*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat .

4.1. Tujuan

Adapun tujuan Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 yang telah disusun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air.
2. Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban serta pencegahan dan penanganan adanya konflik.
3. Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang sehat bagi masyarakat.
4. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

4.2. Sasaran

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan *Tujuan* diatas adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan.
2. Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial
3. Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik.
4. Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan.
5. Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
6. Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah.

Adapun tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 yang telah disusun juga dapat dilihat pada Tabel berikut:

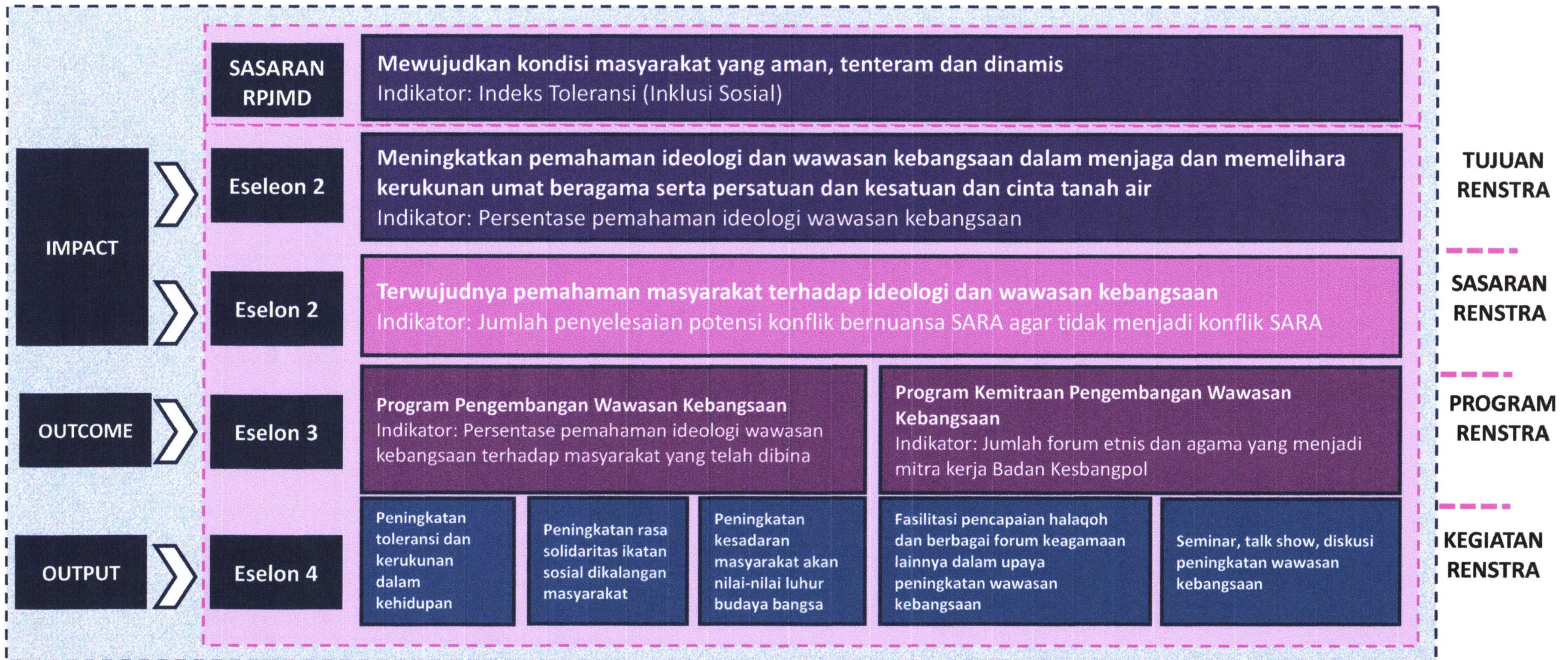
**TABEL TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

SASARAN RPJMD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				Ket.
					2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama	Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA	-	0 kasus	0 kasus	0 kasus	Tujuan dan sasaran setelah Reviu Renstra
	Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	85%	-	-	-	Tujuan dan sasaran sebelum Reviu Renstra
Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban serta pencegahan dan penanganan adanya konflik	Persentase konflik sosial yang terjadi	Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial	Prosentase penanganan konflik sosial	-	0 %	0 %	0 %	Tujuan dan sasaran setelah Reviu Renstra
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial untuk meningkatkan kewaspadaan nasional	Jumlah konflik sosial	Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban yg kondusif serta pencegahan dan penanganan adanya konflik.	Jumlah konflik sosial	10 kasus	-	-	-	Tujuan dan sasaran sebelum Reviu Renstra

	Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang sehat bagi masyarakat.	Prosentase pemahaman politik dan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%	90%	90%	90%	Tujuan dan sasaran setelah Reviu Renstra
			Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Prosentase fasilitasi pendidikan politik	-	100%	100%	100%	
		Indeks pemahaman politik masyarakat	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Indeks pemahaman politik masyarakat	85%	-	-	-	Tujuan dan sasaran sebelum Reviu Renstra
Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase pencapaian tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	-	90%	90%	90%	Tujuan dan sasaran setelah Reviu Renstra
			Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	-	80,1 kategori nilai SAKIP	80,1 kategori nilai SAKIP	80,1 kategori nilai SAKIP	Tujuan dan sasaran setelah Reviu Renstra
Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Presentase Ketercukupan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Presentase Ketercukupan Administrasi Perkantoran	85%	90%	95%	100%	Tujuan dan sasaran sebelum Reviu Renstra
		Prosentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Prosentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	85%	90%	95%	100%	
		Prosentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja		Prosentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja	85%	90%	95%	100%	
		Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan		Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan	85%	90%	95%	100%	

Berikut adalah pohon kinerja (logframe) yang disusun berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022.

POHON KINERJA



POHON KINERJA



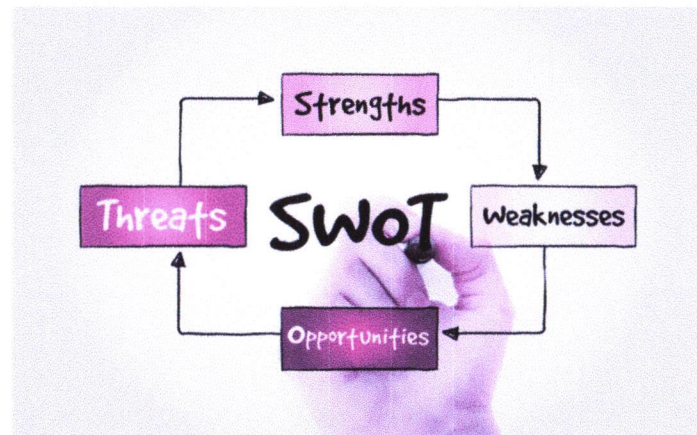
BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Dalam upaya untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Kotawaringin Barat perlu adanya strategi bersama. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Agar strategi yang dirumuskan lebih tepat maka dilakukan analisis **SWOT** (*Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats*) yang mengarah kepada kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dalam meraih peluang dan menentukan arah kebijakan.

*“Berikut adalah gambaran analisis SWOT
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kotawaringin Barat yang telah dirumuskan.”*



		Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	
		Dengan adanya Mou antar pemerintah daerah Kab.Ktw.barat dgn Pemerintah Kab. Banyuwangi kemungkinan dapat merubah pola pikir (mindset) aparaturnya kesbangpol untuk meningkatkan kinerja	Kurangnya SDM dalam SKPD	Daya serap realisasi fisik dan keuangan yang lambat
		Adanya kerjasama dengan instansi vertikal (keamanan daerah) yang membantu badan kesbangpol dalam rangka memelihara kamtibmas	Kinerja aparaturnya yang bekerja selalu menunggu anggaran	Kurangnya pemahaman dan partisipasi politik masyarakat
		Adanya forum-forum binaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya	Masalah kelembagaan atau SOTK yang tumpang tindih antar SKPD	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang organisasi dan lembaga kemasyarakatan
Opportunity (Peluang)		S+O	W+O	
Adanya political will dari Pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kerukunan umat beragama		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan sebagai Upaya Mewujudkan Kondisi Sosial Masyarakat yang Kondusif	Peningkatan Kapasitas Aparatur Sebagai Upaya Menciptakan Pelayanan Kesbangpol yang Unggul	Optimalisasi Data Base Kesbangpol sebagai upaya Efektivitas Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Masyarakat Melalui Program dan Kegiatan Baru (Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan)
Threats (Ancaman)		S+T	W+T	
Menurunnya kebanggaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional	Adanya wacana menjadikan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik menjadi urusan pusat/instansi vertikal	Sinergitas <i>Stakeholders</i> sebagai Upaya Memelihara Kondisi Sosial Masyarakat yang Aman dan Kondusif dan Memegang Teguh Nilai-Nilai Kebangsaan	Optimalisasi Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam Memelihara Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	
Pergeseran nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat dikarenakan melupakan sejarah perjalanan perjuangan bangsa	Masih adanya isu-isu yang bernuansa SARA yg dapat menimbulkan konflik antar etnis, agama dan golongan			
Kerawanan adanya gesekan pada pemilu dan pemilukada serentak	Rawan terjadinya konflik antar suku karena banyaknya warga pendatang dari berbagai daerah.			

Dari gambaran **SWOT** diatas maka dapat dirumuskan strategi yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2019-2022. Sebagai upaya mewujudkan strategi yang tepat maka dilakukan pemetaan (*strategy mapping*) yang melintasi 2 (dua) perspektif yaitu perspektif masyarakat/layanan dan perspektif kelembagaan.

Berdasarkan dua perspektif tersebut maka dapat dirumuskan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ada 2 (dua) strategi antara lain :

1. Dari perspektif masyarakat/layanan :

Strategi : *Mengoptimalkan stakeholder yang ada sebagai upaya memelihara kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dengan memegang teguh nilai-nilai kebangsaan.*

2. Dari Perspektif kelembagaan :

Strategi : *Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan sebagai upaya mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang aman dan kondusif guna menciptakan pelayanan kesbangpol yang unggul.*

Tabel I. Strategi

Perspektif Masyarakat	STRATEGI
Sinergitas <i>Stakeholders</i> sebagai Upaya Memelihara Kondisi Sosial Masyarakat yang Aman dan Kondusif dan Memegang Teguh Nilai-Nilai Kebangsaan	Mengoptimalkan <i>stakeholder</i> yang ada sebagai upaya memelihara kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dengan memegang teguh nilai-nilai kebangsaan
Optimalisasi Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam Memelihara Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	
Perspektif Kelembagaan	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan sebagai Upaya Mewujudkan Kondisi Sosial Masyarakat yang Kondusif	Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan sebagai upaya mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang aman dan kondusif guna menciptakan pelayanan kesbangpol yang unggul
Optimalisasi Data Base Kesbangpol sebagai upaya Efektivitas Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Masyarakat Melalui Program dan Kegiatan Baru (Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan)	
Peningkatan Kapasitas Aparatur Sebagai Upaya Menciptakan Pelayanan Kesbangpol yang Unggul	

*“Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.”*Adapun arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan 2 (dua) strategi yang telah dirumuskan diatas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pencegahan Konflik Sosial dan Tindak Kriminal
2. Sosialisasi peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Kehidupan Beragama, Berbangsa, dan Bernegara.
3. Penguatan hubungan antar forum keagamaan dan forum lintas etnis.
4. Peningkatan Pencegahan Konflik Sosial dan Tindak Kriminal
5. Sosialisasi peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat.
6. Penguatan kelembagaan kemasyarakatan.
7. Meningkatkan Sistem Koordinasi Aparatur Kesbangpol.
8. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesbangpol.

Tabel II. Arah Kebijakan

Alternatif Strategi	Strategi	Arah Kebijakan
Sinergitas <i>Stakeholders</i> sebagai Upaya Memelihara Kondisi Sosial Masyarakat yang Aman dan Kondusif dan Memegang Teguh Nilai-Nilai Kebangsaan	Mengoptimalkan <i>stakeholder</i> yang ada sebagai upaya memelihara kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dengan memegang teguh nilai-nilai kebangsaan	Sosialisasi peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Kehidupan Beragama, Berbangsa, dan Bernegara
Optimalisasi Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam Memelihara Kehidupan Masyarakat yang Harmonis		Penguatan hubungan antar forum keagamaan dan forum lintas etnis
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan sebagai Upaya Mewujudkan Kondisi Sosial Masyarakat yang Kondusif	Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan sebagai upaya mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang aman dan kondusif guna menciptakan pelayanan kesbangpol yang unggul	Peningkatan Pencegahan Tindak Kriminal
Optimalisasi Data Base Kesbangpol sebagai upaya Efektivitas Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Masyarakat Melalui Program dan Kegiatan Baru (Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan)		Penguatan kelembagaan kemasyarakatan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Sebagai Upaya Menciptakan Pelayanan Kesbangpol yang Unggul		Sosialisasi peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat
		Meningkatkan Sistem Koordinasi Aparatur Kesbangpol
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesbangpol

Strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan diatas dapat ditarik kesimpulan dalam penentuan Tematik Pembangunan OPD yang menjadi prioritas kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat selama 3 (tiga) Tahun kedepan dan 1 (satu) tahun berjalan. Adapun tematik pembangunan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III Tematik Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Arah Kebijakan	2019	2020	2021	2022
1	Sosialisasi peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Kehidupan Beragama, Berbangsa, dan Bernegara				
2	Penguatan hubungan antar forum keagamaan dan forum lintas etnis				
3	Peningkatan Pencegahan Tindak Kriminal				
4	Sosialisasi peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat				
5	Penguatan kelembagaan kemasyarakatan				
Tematik Pembangunan OPD		<i>Pemantapan keamanan menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wapres</i>	<i>Peningkatan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara pasca pileg dan pilpres</i>	<i>peningkatan pemahaman politik masyarakat terhadap pemilukada serentak</i>	<i>Pemantapan keamanan menjelang pemilukada serentak</i>

Penjelasan Tematik Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penjelasan tematik tahun 2019 : 1. ditahun ini akan dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif, untuk itu badan kesbangpol bertugas untuk memantapkan dan memelihara keamanan agar tetap kondusif dan bersinergi dengan aparat keamanan daerah
: 2. ditahun politik ini juga Badan Kesbangpol akan lebih memantapkan dibidang politik agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilpres dan Pileg Tahun 2019.

Penjelasan tematik tahun 2020 : agar tidak ada sekat antar kelompok masyarakat pasca terbaginya dukungan suara pada Pilpres dan Pileg Tahun 2019 sehingga perlu meningkatkan hubungan masyarakat baik lintas etnis, golongan dan agama

Penjelasan tematik tahun 2021 : untuk menekan angka golput pada pemilu kada serentak yag akan dilaksanakan pada tahun 2022 maka badan kesbangpol mempersiapkan pendidikan politik masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.

- Penjelasan tematik tahun 2021 : 1. ditahun ini akan dilaksanakan Pemilukada serentak, untuk itu badan kesbangpol bertugas untuk memantapkan dan memelihara keamanan agar tetap kondusif dan bersinergi dengan aparat keamanan daerah.
- : 2. ditahun politik ini juga Badan Kesbangpol akan lebih memantapkan dibidang politik agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilukada serentak tahun 2022.

Dari poin-poin rumusan yang telah disusun diatas, sebaiknya dapat memperhatikan rumusan arah kebijakan untuk menghubungkan strategi pada sasaran agar tetap terjaga linieritas antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Hal ini tertuang pada tabel berikut ini :

TABEL IV PERUMUSAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Mengoptimalkan stakeholder yang ada sebagai upaya memelihara kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dengan memegang teguh nilai-nilai kebangsaan	Sosialisasi peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Kehidupan Beragama, Berbangsa, dan Bernegara
			Penguatan hubungan antar forum keagamaan dan forum lintas etnis
Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban serta pencegahan dan penanganan adanya konflik	Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial	Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan sebagai upaya mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang aman dan kondusif guna menciptakan pelayanan kesbangpol yang unggul	Peningkatan Pencegahan Tindak Kriminal
Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang sehat bagi masyarakat.	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik		Penguatan kelembagaan kemasyarakatan
	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan		Sosialisasi peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi		Meningkatkan Sistem Koordinasi Aparatur Kesbangpol
	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesbangpol

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis perubahan yang lebih operasional untuk sisa kurun waktu 3 (tiga) tahun dan tahun yang sedang berjalan (2019-2022) yang meliputi program dan kegiatan serta pendanaan. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis yang akan dituangkan dalam Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022.

Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama 3 tahun kedepan akan diuraikan sebagai berikut :

a. Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan pembinaan karakter bangsa di kalangan masyarakat. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan berikut :

1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
2. Peningkatan rasa solidaritas ikatan sosial di kalangan masyarakat.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta pencegahan terjadinya konflik sosial. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan berikut :

1. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.
2. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah.
4. Pencegahan dan penanganan konflik sosial.

c. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan bangsa di kalangan masyarakat. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan berikut:

1. Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.
2. Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan.

d. Program pendidikan politik masyarakat

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan peran serta masyarakat, pemilih pemula dan para peserta pemilu (partai politik). Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan berikut :

1. Penyuluhan kepada masyarakat
2. Forum-forum diskusi politik.
3. Penyusunan data base partai politik.
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

e. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi memberikan pemahaman dan pembinaan kepada organisasi dan lembaga kemasyarakatan untuk peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan berikut :

1. Pembinaan Ormas dan LSM.
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Ormas dan LSM.

Selain program dan kegiatan prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, terdapat juga program dan kegiatan yang bersifat rutin/umum sebagai penunjang kegiatan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11. Penyediaan peralatan rumah tangga
12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
13. Penyediaan makanan dan minuman
14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan gedung kantor
2. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4. Pengadaan peralatan gedung kantor
5. Pengadaan mebeleur
6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
10. Rehabilitas sedang/berat rumah dinas/jabatan
11. Rehabilitas sedang/berat gedung kantor

h. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan mesin/kartu absensi
2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

i. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

1. Pemulangan pegawai yang pensiun

j. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

k. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Rencana program dan kegiatan pendanaan serta pendanaan indikatif secara ringkas disajikan dalam 2 (dua) tabel yaitu **tabel Bab 6.1 setelah revid Renstra dan 6.2 sebelum revid Renstra** sebagai berikut:

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN SETELAH REVIU RENSTRA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASE LINE DATA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2022)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6			13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	Urusan Wajib	-	-			-	-	-	-	-	-		
-	-	-		-	-			-	-	-	-	-	-		
-	-	5	Belanja	-	12 Bulan	12 Bulan	6.300.826.000	12 Bulan	6.836.553.045	12 Bulan	12.433.099.425	12 Bulan	13.474.572.489		
-	-	5.1	Belanja Tidak Langsung	-	12 Bulan	12 Bulan	3.814.006.000	12 Bulan	4.443.183.045	12 Bulan	4.665.342.197	12 Bulan	4.898.609.307		
-	-	5.1.1	Belanja Pegawai	-	12 Bulan	12 Bulan	3.814.006.000	12 Bulan	4.443.183.045	12 Bulan	4.665.342.197	12 Bulan	4.898.609.307		
-	-	5.2	Belanja Langsung	-	12 Bulan	12 Bulan	2.486.820.000	12 Bulan	2.393.370.000	12 Bulan	7.767.757.228	12 Bulan	8.575.963.182		
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	1.05.1.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran	90%	90%	627.758.800	90%	671.649.300	90%	1.159.257.228	90%	1.384.463.182	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
		1.05.1.05.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket/surat yang terkirim	12 paket	12 paket	600.000	-	0,00	12 paket	2.000.000	12 paket	2.000.000		

	1.05.1.05.02.0 1.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	80.220.000	12 bulan	64.320.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	250.000.000		
	1.05.1.05.02.0 1.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	11 unit/thn	8 unit/thn	2.650.000	-	0,00	14 unit/thn	3.700.000	15 unit/thn	5.000.000		
	1.05.1.05.02.0 1.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	12 bulan 2 org	12 bulan	105.957.000	12 bulan	141.000.000	12 bulan	31.212.000	12 bulan	117.500.000		
									5 org	150.000.000	5 org	200.000.000		
	1.05.1.05.02.0 1.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	1 org/thn 20 jenis	12 bulan	46.233.000	12 bulan	48.000.000	1 org/thn	35.000.000	1 org/thn	35.000.000		
									22 jenis	20.000.000	22 jenis	20.000.000		
	1.05.1.05.02.0 1.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	20 unit/thn	22 unit/thn	17.589.300	18 unit	15.380.000	40 unit	31.150.000	40 unit	31.150.000		
	1.05.1.05.02.0 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	49 jenis	52 jenis	49.622.000	40 jenis	50.000.000	52 jenis	141.479.200	52 jenis	141.479.200		
	1.05.1.05.02.0 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan / jenis dan Jumlah penggandaan yang disediakan	13 jenis 106.320 lbr	12 jenis	39.212.500	7 jenis	40.000.000	13 jenis	10.000.000	13 jenis	12.000.000		
					114.625 lbr		102.200 lbr		109000 lbr	37.000.000	110000 lbr	37.000.000		
	1.05.1.05.02.0 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 jenis	7 jenis	7.000.000	7 jenis	7.000.000	4 jenis	7.300.000	4 jenis	7.300.000		
	1.05.1.05.02.0 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	21 unit/bh	36 unit/thn	32.075.000	20 unit	5.000.000	45 unit	75.900.000	41 unit	91.000.000		

		1.05.1.05.02.0 1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	-	2 unit	1.000.000	2 unit	1.000.000	1 jenis	1.500.000	1 jenis	1.500.000		
		1.05.1.05.02.0 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	-	0,00	-	0,00	5 eksemplar	2.500.000	5 eksemplar	2.500.000		
		1.05.1.05.02.0 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	-	220 org/kali	3.850.000	300 org	5.250.000	5 org	30.000.000	6 org	40.000.000		
		1.05.1.05.02.0 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	374 org/kali	143 org/kali	241.750.000	186 kali	294.699.300	200 kali	380.516.028	200 kali	391.033.982		
		1.05.1.05.02 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	90%	320.292.500	90%	154.850.000	90%	864.500.000	90%	587.500.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
		1.05.1.05.02.0 2.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	-	1 paket	19.162.500	-	0,00	-	0,00	-	0,00 0		
		1.05.1.05.02.0 2.05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	-	-	0,00	-	0,00	4 unit	100.000.000	4 unit	100.000.000		
		1.05.1.05.02.0 2.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	153 bh/M	-	0,00	-	0,00	-	0,00	120 buah	30.000.000		
		1.05.1.05.02.0 2.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 unit	3 unit	18.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	24.000.000	-	0,00		

		1.05.1.05.02.0 2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	1 buah	2 buah	10.000.000	2 unit	10.000.000	74 unit	206.000.000	50 unit	50.000.000		
		1.05.1.05.02.0 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	-	3500 M2	35.000.000	1 unit	5.000.000	3500 M2	72.500.000	3500 M2	75.000.000		
		1.05.1.05.02.0 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	11 unit/thn	8 unit/thn	22.250.000	8 unit	23.500.000	14 unit	200.000.000	15 unit	300.000.000		
		1.05.1.05.02.0 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	-	8 unit	4.880.000	-	0,00	15 unit	19.000.000	17 unit	27.500.000		
		1.05.1.05.02.0 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	8 unit	2 unit	1.000.000	10 unit	6.350.000	2 unit	3.000.000	2 unit	5.000.000		
		1.05.1.05.02.0 2.41	Rehabilitas sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi sedang/berat	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
		1.05.1.05.02.0 2.42	Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1 paket	1 paket	210.000.000	1 unit per tahun	100.000.000	2 unit per tahun	240.000.000	-	0,00		
		1.05.1.05.02.0 3.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur	90%	90%	41.000.000	90%	37.200.000	90%	44.000.000	90%	44.000.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
		1.05.1.05.02.0 3.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi yg diadakan	1 unit	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
		1.05.1.05.02.0 3.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	35 stell	33 stell dan 7 buah	21.200.000	31 stell	18.600.000	40 stell	22.000.000	40 stell	22.000.000		

Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	1.05.1.05.02.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	35 stell	33 stell	19.800.000	31 stell	18.600.000	40 stell	22.000.000	40 stell	22.000.000		
	1.05.1.05.02.04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Pemenuhan Layanan Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	-	-	0,00	-	0,00		0,00		0,00	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
	1.05.1.05.02.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
	1.05.1.05.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90%	90%	100.700.000	90%	63.000.000	90%	250.000.000	90%	300.000.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
	1.05.1.05.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	32 org	30 org	100.700.000	6 org kali	63.000.000	30 org kali	250.000.000	30 org kali	300.000.000	-	-
	1.05.1.05.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%			90%	24.050.000	90%	50.000.000	90%	60.000.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
	1.05.1.05.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 laporan	-	0,00	1 laporan	500.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	10.000.000	-	-

		1.05.1.05.02.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran disusun	1 laporan	-	0,00	1 laporan	550.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	15.000.000	-	-
		1.05.1.05.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun disusun	1 laporan	1 laporan	14.000.000	1 laporan	23.000.000	1 laporan	35.000.000	1 laporan	35.000.000	-	-
Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	1.05.1.05.02.20	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	0 kasus	0 kasus	494.090.100	29,05 %	541.550.000	43,33%	490.000.000	30,23%	575.000.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
		1.05.1.05.02.20.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama	Jumlah peserta sosialisasi kerukunan umat beragama	-	-	0,00	-	0,00	100 org	90.000.000	100 org	150.000.000		
		1.05.1.05.02.20.02	Peningkatan rasa solidaritas ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan pembauran kebangsaan	127 org	100 org	201.965.100	50 org	366.550.000	200 org	200.000.000	200 org	200.000.000		
		1.05.1.05.02.20.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah pemuda-pemudi dan pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) dan Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	470 org	470 org	292.175.000	350 org	175.000.000	470 org	200.000.000	470 org	225.000.000		
		1.05.1.05.02.21	Kemitraan etnis dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah forum etnis dan agama yang menjadi mitra kerja Badan Kesbangpol	85%	-	0,00	-	0,00	2 forum	310.000.000	2 forum	425.000.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat

		1.05.1.05.02.2 1.01	Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah anggota forum lintas agama yg mengikuti pertemuan pengembangan wawasan kebangsaan	1 forum /100 org	-	0,00	-	0,00	1 forum/100 org	160.000.000	1 forum/100 org	225.000.000		
		1.05.1.05.02.2 1.02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta seminar wawasan kebangsaan	-	-	0,00	-	0,00	250 org	150.000.000	250 org	200.000.000		
Stabilitas keamanan, ketertarikan dan ketertiban serta pencegahan dan penanganan adanya konflik	Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial	1.05.1.05.02.22	Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah partisipasi instansi vertikal (tim keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantramtibmas	4 instansi	4 instansi	505.200.100	8 instansi	492.595.000	8 instansi	2.800.000.000	8 instansi	3.100.000.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
		1.05.1.05.02.2 2.01	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah patroli keamanan instansi vertikal (aparat keamanan daerah) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	4 instansi/30 org	4 instansi	402.550.000	36 keg.	395.645.000	36 keg.	1.600.000.000	36 keg.	1.800.000.000		
		1.05.1.05.02.2 2.02	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah frekuensi pemantauan situasi dan kondisi dalam rangka deteksi dini kewaspadaan masyarakat	-	-	0,00	-	0,00	12 keg.	600.000.000	12 keg.	600.000.000		
		1.05.1.05.02.2 2.03	Pencegahan dan penanganan konflik sosial	Jumlah laporan rencana aksi daerah (RAD)	30 laporan	30 laporan	102.650.100	30 laporan	96.950.000	30 laporan	200.000.000	30 laporan	200.000.000		

				Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan penanganan konflik sosial	-	-	0,00	-	0,00	200 org	400.000.000	200 org	500.000.000		
Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang sehat bagi masyarakat.	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	1.05.1.05.02.23	Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase pemahaman politik masyarakat	90%	90%	223.481.500	30,63%	303.770.000	20,52%	1.000.000.000	17,02%	1.100.000.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
		1.05.1.05.02.23.01	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan politik masyarakat	610 org	120 org/kali	209.851.500	200 org	279.615.000	200 org	300.000.000	200 org	350.000.000		
		1.05.1.05.02.23.02	Forum-forum diskusi politik	Jumlah peserta sosialisasi bantuan parpol dlm rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban parpol	30 org	30 org	13.630.000	30 org	24.155.000	150 org	300.000.000	150 org	300.000.000		
		1.05.1.05.02.23.03	Penyusunan data base partai politik	Jumlah Dokumen database parpol	-	-	0,00	-	0,00	9 dokumen	200.000.000	9 dokumen	225.000.000		
		1.05.1.05.02.23.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	0,00	-	0,00	6 laporan	200.000.000	6 laporan	225.000.000		
	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	1.05.1.05.02.24	Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang terbina	90%	90%	160.297.000	54%	104.705.700	58%	800.000.000	77%	1.000.000.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
		1.05.1.05.02.24.01	Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan/sosialisasi tentang ormas dan LSM yg dibina	180 org	100 org	77.552.500	140 org	61.324.700	300 org	250.000.000	300 org	350.000.000		
		1.05.1.05.02.24.02	Monitoring evaluasi dan pelaporan Ormas dan LSM	Jumlah laporan hasil monev Ormas dan LSM	6 kec.	6 kec.	82.744.500	6 lap.	43.381.000	6 lap.	250.000.000	6 lap.	300.000.000		
				Jumlah rapat/monitoring saber punggli	4 kali	3 kali									

TABEL 6.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN SEBELUM REVIU RENSTRA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASE LINE DATA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2022)			
						Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	Urusan Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	5	Belanja	-		12 Bulan	5.657.840.000	12 Bulan	6.369.819.000	12 Bulan	9.879.304.458	12 Bulan	10.946.596.961	12 Bulan	12.433.099.425	12 Bulan	13.474.572.489		
-	-	5.1	Belanja Tidak Langsung	-		12 Bulan	2.800.081.000	12 Bulan	4.030.098.000	12 Bulan	4.231.602.900	12 Bulan	4.443.183.045	12 Bulan	4.665.342.197	12 Bulan	4.898.609.307		
-	-	5.1.1	Belanja Pegawai	-		12 Bulan	2.800.081.000	12 Bulan	4.030.098.000	12 Bulan	4.231.602.900	12 Bulan	4.443.183.045	12 Bulan	4.665.342.197	12 Bulan	4.898.609.307		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	5.2	Belanja Langsung	-	-	-	2.857.759.000	-	2.339.721.000	-	5.647.701.558	-	6.503.413.916	-	7.767.757.228	-	8.575.963.182		

Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	1.05.1.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		90%	745.150.500	90%	613.139.000	90%	886.601.558	90%	876.213.916	90%	1.159.257.228	90%	1.384.463.182	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
		1.05.1.05.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	N/A	12 bulan	600.000	12 paket	600.000	12 paket	1.000.000	12 paket	1.000.000	12 paket	2.000.000	12 paket	2.000.000		
		1.05.1.05.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	N/A	12 bulan	111.000.000	12 bulan	112.200.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	250.000.000		
		1.05.1.05.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	N/A	11 unit/thn	3.650.000	11 unit/thn	3.250.000	12 unit/thn	3.300.000	13 unit/thn	3.500.000	14 unit/thn	3.700.000	15 unit/thn	5.000.000		
		1.05.1.05.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	N/A	12 bulan	104.573.000	12 bulan	27.851.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.600.000	12 bulan	31.212.000	12 bulan	117.500.000		
						2 org	58.511.800	2 org	74.781.200	3 org	120.000.000	3 org	120.000.000	5 org	150.000.000	5 org	200.000.000		
		1.05.1.05.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	N/A	1 org/thn	26.479.200	1 org/thn	33.690.800	1 org/thn	34.000.000	1 org/thn	34.000.000	1 org/thn	35.000.000	1 org/thn	35.000.000		
						20 jenis	10.400.000	20 jenis	10.900.000	20 jenis	15.000.000	20 jenis	15.000.000	22 jenis	20.000.000	22 jenis	20.000.000		
		1.05.1.05.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	N/A	31 unit/thn	23.390.000	20 unit/thn	15.480.000	36 unit/thn	27.270.000	36 unit/thn	27.270.000	40 unit/thn	31.150.000	40 unit/thn	31.150.000		
		1.05.1.05.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diperlukan	N/A	50 jenis	64.068.200	49 jenis	52.914.500	50 jenis	89.979.200	50 jenis	89.979.200	52 jenis	141.479.200	52 jenis	141.479.200		
		1.05.1.05.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	N/A	12 jenis	2.600.500	13 jenis	8.200.500	13 jenis	9.000.000	13 jenis	10.000.000	13 jenis	10.000.000	13 jenis	12.000.000		
						106.320 lbr	28.580.000	106.320 lbr	33.896.000	107000 lbr	36.000.000	108000 lbr	37.000.000	109000 lbr	37.000.000	110000 lbr	37.000.000		

	1.05.1.05.0 2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	N/A	6 jenis	10.935.000	4 jenis	7.000.000	4 jenis	6.500.000	4 jenis	6.500.000	4 jenis	7.300.000	4 jenis	7.300.000		
	1.05.1.05.0 2.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	N/A	31 unit/bh	54.000.000	21 unit/bh	17.875.000	30 unit/bh	54.875.000	25 unit/bh	51.375.000	45 unit/bh	75.900.000	41 unit/bh	91.000.000		
	1.05.1.05.0 2.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	N/A	-	0,00	-	0,00	2 buah	2.000.000	2 buah	2.000.000	1 buah	1.500.000	1 buah	1.500.000		
	1.05.1.05.0 2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	N/A	-	0,00	-	0,00	5 buku	2.500.000	5 buku	2.500.000	5 buku	2.500.000	5 buku	2.500.000		
	1.05.1.05.0 2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	N/A	3 org	15.540.000	-	0,00	4 org	20.160.000	5 org	30.000.000	5 org	30.000.000	6 org	40.000.000		
	1.05.1.05.0 2.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	N/A	12 bln	230.822.800	374 org/kali	214.500.000	100 org/kali	315.017.358	100 org/kali	295.489.716	200 org/kali	380.516.028	200 org/kali	391.033.982		
Meningkatnya tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	1.05.1.05.02.02	Program Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		90%	349.245.000	90%	89.720.000	90%	454.000.000	90%	597.000.000	90%	864.500.000	90%	587.500.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
	1.05.1.05.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	N/A	-	0,00	-	0,00	73 M2 1 paket	20.000.000 10.000.000	- 0,00	0,00 0,00	- 0,00	0,00 0,00	- 0,00	0,00 0,00		

1.05.1.05.0 2.02.05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	N/A	-	0,00	-	0,00	1 unit	22.000.000	2 unit	425.000.000	4 unit	100.000.000	4 unit	100.000.000		
1.05.1.05.0 2.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	N/A	-	0,00	153 bh/M	28.450.000	4 buah	9.000.000	12 buah	6.000.000	-	0,00	120 buah	30.000.000		
1.05.1.05.0 2.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	N/A	-	0,00	1 unit	4.000.000	4 unit/bh	14.000.000	2 unit	12.000.000	2 unit	24.000.000	-	0,00		
1.05.1.05.0 2.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	N/A	55 buah	35.850.000	1 buah	4.000.000	9 buah	18.500.000	-	0,00	74 buah	206.000.000	50 buah	50.000.000		
1.05.1.05.0 2.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	N/A	3500 M2	40.000.000	-	0,00	3500 M2	35.000.000	3500 M2	35.000.000	3500 M2	72.500.000	3500 M2	75.000.000		
1.05.1.05.0 2.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	N/A	11 unit/thn	106.000.000	11 unit/thn	22.250.000	12 unit/thn	105.000.000	13 unit/thn	108.000.000	14 unit/thn	200.000.000	15 unit/thn	300.000.000		
1.05.1.05.0 2.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	N/A	-	0,00	-	0,00	10 unit	9.000.000	10 unit	9.000.000	15 unit	19.000.000	17 unit	27.500.000		

1.05.1.05.0 2.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	N/A	13 unit	8.070.000	8 unit	4.770.000	2 unit	1.500.000	2 unit	2.000.000	2 unit	3.000.000	2 unit	5.000.000		
1.05.1.05.0 2.02.41	Rehabilitas sedang/berat rumah dinas/jabatan	Jumlah atau luasan rumah dinas yang direhabilitasi sedang/berat	N/A	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
1.05.1.05.0 2.02.42	Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	Jumlah atau luasan gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	N/A	1 buah dan 500 M2	159.325.000	1 paket	26.250.000	2 paket	210.000.000	-	0,00	2 paket	240.000.000	-	0,00		
1.05.1.05.0 2.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur		90%	37.400.000	90%	46.000.000	90%	39.600.000	90%	40.700.000	90%	44.000.000	90%	44.000.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
1.05.1.05.0 2.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi fingerprint yg diadakan	N/A	-	0,00	1 unit	7.500.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
1.05.1.05.0 2.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	N/A	34 stell	18.700.000	35 stell	19.250.000	36 stell	19.800.000	37 stell	20.350.000	40 stell	22.000.000	40 stell	22.000.000		
1.05.1.05.0 2.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	N/A	34 stell	18.700.000	35 stell	19.250.000	36 stell	19.800.000	37 stell	20.350.000	40 stell	22.000.000	40 stell	22.000.000		

1.05.1.05.02.04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat Fasilitas pindah/purna tugas PNS		100 %	10.000.000	-	0,00	80%	20.000.000	80%	20.000.000		0,00		0,00	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
1.05.1.05.02.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	N/A	1 org	10.000.000	-	0,00	1 org	20.000.000	1 org	20.000.000	-	0,00	-	0,00		
1.05.1.05.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya		90%	108.800.000	90%	112.300.000	90%	108.000.000	90%	130.000.000	90%	250.000.000	90%	300.000.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
1.05.1.05.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	N/A	42 org	108.800.000	32 org	112.300.000	25 org	108.000.000	25 org	130.000.000	30 org	250.000.000	30 org	300.000.000	-	-
1.05.1.05.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		90%	9.000.000	90%	35.052.000	90%	39.500.000	90%	39.500.000	90%	50.000.000	90%	60.000.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
1.05.1.05.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	N/A	5 buku	1.000.000	1 laporan	500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	10.000.000	-	-

		1.05.1.05.0 2.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	N/A	10 buku	3.000.000	1 laporan	550.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	15.000.000	-	-
		1.05.1.05.0 2.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	N/A	10 buku	5.000.000	1 laporan	34.002.000	1 laporan	35.000.000	1 laporan	35.000.000	1 laporan	35.000.000	1 laporan	35.000.000	-	-
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial untuk meningkatkan kewaspadaan nasional	Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban serta pencegahan dan penanganan adanya konflik	1.05.1.05.0 2.16	Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah partisipasi instansi vertikal (keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantramtibmas		4 instansi	535.560.000	4 instansi	608.350.000	4 instansi	2.100.000.000	4 instansi	2.300.000.000	4 instansi	2.800.000.000	4 instansi	3.100.000.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
		1.05.1.05.0 2.16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah kerjasama dengan instansi vertikal (aparat keamanan daerah)	N/A	4 instansi	535.560.000	4 instansi/30 org	485.300.000	4 instansi	1.000.000.000	4 instansi	1.200.000.000	4 instansi	1.600.000.000	4 instansi	1.800.000.000		
		1.05.1.05.0 2.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah forum dalam peningkatan kapasitas aparat	N/A	-	0,00	-	0,00	2 forum	600.000.000	2 forum	600.000.000	2 forum	600.000.000	2 forum	600.000.000		
		1.05.1.05.0 2.16.05	Pencegahan dan penanganan konflik sosial	Jumlah laporan rencana aksi daerah	N/A	-	0,00	30 laporan	123.050.000	30 laporan	200.000.000	30 laporan	200.000.000	30 laporan	200.000.000	30 laporan	200.000.000		

				Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan penanganan konflik sosial		-	0,00	200 org		200 org	300.000.000	200 org	300.000.000	200 org	400.000.000	200 org	500.000.000		
Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	1.05.1.05.02.17	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah konflik yang bernuansa SARA		0 Kasus	280.705.000	0 kasus	358.090.000	0 kasus	380.000.000	0 kasus	490.000.000	0 kasus	490.000.000	0 kasus	575.000.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
		1.05.1.05.02.17.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta sosialisasi kerukunan umat beragama	N/A	-	0,00	-		100 org	80.000.000	100 org	90.000.000	100 org	90.000.000	100 org	150.000.000		
		1.05.1.05.02.17.02	Peningkatan rasa solidaritas ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan pembauran kebangsaan	N/A	90 org	155.260.000	127 org	147.875.000	150 org	150.000.000	200 org	200.000.000	200 org	200.000.000	200 org	200.000.000		
		1.05.1.05.02.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta IBAB dan seminar peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	N/A	70 org	125.445.000	470 org	210.215.000	470 org	150.000.000	470 org	200.000.000	470 org	200.000.000	470 org	225.000.000		
		1.05.1.05.02.18	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase kelompok etnis dan agama yang tergabung forum-forum binaan kesbangpol		85%	259.390.000	85%	101.190.000	90%	220.000.000	90%	310.000.000	90%	310.000.000	90%	425.000.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat

		1.05.1.05.0 2.18.01	Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah forum lintas agama	N/A	2 forum /100 org	200.100.000	1 forum /100 org	101.190.000	1 forum /100 org	120.000.000	1 forum/100 org	160.000.000	1 forum/100 org	160.000.000	1 forum/100 org	225.000.000		
		1.05.1.05.0 2.18	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta seminar	N/A	94 org	59.290.000	-	0,00	200 org	100.000.000	250 org	150.000.000	250 org	150.000.000	250 org	200.000.000		
-	-	1.05.1.05.0 02.20	Program Peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat (saber pungli)			284.210.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
		1.05.1.05.0 2.20.04	Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban aksi Premanisme	Jumlah tim saber pungli	N/A	1 Tahun	284.210.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	1.05.1.05.0 02.21	Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase peningkatan pemilih yang dibina pada pemilu		90%	238.298.500	90%	240.905.000	90%	800.000.000	90%	900.000.000	90%	1.000.000.000	90%	1.100.000.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
		1.05.1.05.0 2.21.01	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan politik masyarakat	N/A	336 org	139.233.500	610 org	205.175.000	200 org	300.000.000	200 org	300.000.000	200 org	300.000.000	200 org	350.000.000		

yang sehat bagi masyara kat.	1.05.1.05.0 2.21.03	Forum-forum diskusi politik	Jumlah peserta sosialisasi bantuan parpol dan Laporan Pertanggungjaw aban parpol	N/A	9 parpol /30 org	99.065.000	30 org	35.730.000	100 org	200.000.000	100 org	250.000.000	150 org	300.000.000	150 org	300.000.000		
	1.05.1.05.0 2.21.04	Penyusunan data base partai politik	Jumlah Dokumen database parpol	N/A	-	0,00	-	0,00	9 doku men	150.000.000	9 dokumen	175.000.000	9 dokumen	200.000.000	9 dokumen	225.000.000		
	1.05.1.05.0 2.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	N/A	-	0,00	-	0,00	6 lapora n	150.000.000	6 laporan	175.000.000	6 laporan	200.000.000	6 laporan	225.000.000		
Pembinaa n terhadap organisasi dan lembaga kemasyara katan	1.05.1.05. 02.27	Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakata n yang terbina				90%	134.975.000	90%	600.000.000	90%	800.000.000	90%	800.000.000	90%	1.000.000.00 0	Badan Kesbangp ol	Ktw. Barat
	1.05.1.05.0 2.27.01	Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan/sosi alisasi tentang ormas dan LSM	N/A	-	0,00	180 org	77.025.000	200 org	200.000.000	200 org	250.000.000	300 org	250.000.000	300 org	350.000.000		
	1.05.1.05.0 2.27.02	Monitoring evaluasi dan pelaporan Ormas dan LSM	Jumlah laporan hasil money Jumlah rapat/monitoring saber pungli	N/A	- -	0,00 0,00	6 kec. 4 kali	 57.950.000	6 kec. 4 kali	200.000.000 200.000.000	6 kec. 4 kali	250.000.000 300.000.000	6 kec. 4 kali	250.000.000 300.000.000	6 kec. 4 kali	300.000.000 350.000.000		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan direncanakan menjadi indikator kinerja utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan, dan hasil Reviu Renstra Tahun 2019 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan mengalami perubahan yang dapat dilihat dalam **tabel bab 7** berikut:

TABEL PERUBAHAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

No	Indikator	Base Line Data	Target Capaian				Ket.
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	6	7	8	9	
1	Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	
2	Prosentase penanganan konflik sosial	-	0%	0%	0%	0%	Indikator setelah Reviu Renstra
	Jumlah konflik sosial	9 kasus	-	-	-	-	Indikator sebelum Reviu Renstra
3	Prosentase fasilitasi pendidikan politik	-	100%	100%	100%	100%	Indikator setelah Reviu Renstra
	Indeks pemahaman politik masyarakat	100%	-	-	-	-	Indikator sebelum Reviu Renstra
4	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	76,58%	90%	90%	90%	90%	

Sebagai pembanding dalam mengukur pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan yang lebih selaras dan akuntabel dilampirkan juga tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) sebelum Reviu Renstra sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.KTW.BARAT
TAHUN 2017-2022

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial untuk meningkatkan kewaspadaan nasional	Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban serta pencegahan dan penanganan adanya konflik	- Jumlah konflik sosial	Jumlah konflik sosial yang terjadi (tahun n) dibagi target konflik sosial (tahun n) dikali 100%	Kabid.Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Nasional (KPA)	Laporan hasil pemantauan/monitoring dan Laporan Rencana Aksi Daerah
Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	- Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	Jumlah masyarakat yang telah dibina dibagi jumlah target masyarakat yang dibina dikali 100%	Kabid. Bina Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa (KPA)	Laporan Bidang Bina Ideologi dan Wasbang
Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang sehat bagi masyarakat.	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	- Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Ormas/LSM yang aktif dibagi jumlah total keseluruhan Ormas/LSM yang di Kab.Ktw.Barat dikali 100%	Kabid. Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas (KPA)	Data Base Ormas/LSM
		- Persentase pemahaman kelembagaan kemasyarakatan terhadap organisasi dan lembaga masyarakat yang telah dibina	Jumlah Ormas/LSM yang dibina dibagi jumlah Ormas/LSM yang terdaftar yang di Kab.Ktw.Barat dikali 100%	Kabid. Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas (KPA)	Laporan Pembinaan Ormas/LSM di Kab.Ktw.Barat
	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	- Indeks pemahaman politik masyarakat	Jumlah masyarakat yang telah dibina melalui pendidikan politik dibagi jumlah target masyarakat yang dibina dikali 100%	Kabid.Politik Dalam Negeri (KPA)	Data Laporan Bidang Poldagri

Berdasarkan tabel perubahan kinerja penyelenggaraan bidang urusan diatas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Tahun 2019-2022 maka telah ditetapkan sebagai Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan bangsa dan Politik Tahun 2019-2022 yang tertuang pada tabel dibawah ini :

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.KTW.BARAT
TAHUN 2019-2022

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1		2	3	4	5	6
Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	-	Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA	Kasus	Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA yg ditangani	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa	Laporan Bidang Bina Ideologi dan Wasbang Bangsa
Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial	-	Prosentase penanganan konflik sosial	%	Jumlah konflik yang ditangani dibagi jumlah konflik dikali 100%	Bidang.Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Nasional	Laporan hasil pemantauan/monitoring dan Laporan Rencana Aksi Daerah
Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	-	Prosentase fasilitasi pendidikan politik	%	Jumlah pembinaan pendidikan politik dibagi jumlah pendidikan politik yang difasillitasi dikali 100%	Bidang Politik Dalam Negeri	Data Laporan Bidang Poldagri
Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	-	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	Jumlah Ormas/LSM yang aktif dibagi jumlah keseluruhan ormas/LSM yang terdaftar dikali 100%	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas	Data Base Ormas/LSM

Selain itu untuk menunjang sasaran dan indikator kinerja sasaran untuk program dan kegiatan rutin Kesekretariatan dapat dilihat pada tabel Indikator Kinerja dibawah ini :

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Rutin Kesekretariatan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	-	%	Rata-rata persentase capaian program	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur
				Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	-	Kategori Nilai SAKIP	Range nilai SAKIP *	Bidang. Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Nasional

*Ket Range Nilai SAKIP :

- AA = 90 - 100
- A = 80 - 90
- BB = 70 - 80
- B = 60 - 70
- CC = 50 - 60
- C = 30 - 50
- D = 0 - 30

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 3 (tiga) Tahun. Rencana Strategis Perubahan ini juga menjadi pedoman bagi seluruh *stakeholder* di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat guna mendukung pencapaian sasaran berdasarkan hasil Reviu RPJMD Kab.Ktw.Barat dan Reviu Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Rencana Strategis Perubahan ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelaksanaan pembangunan selama sisa kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan adalah sebagai acuan kerja bagi seluruh bidang teknis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Selanjutnya Renstra Perubahan Perangkat Daerah ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah direncanakan.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Perubahan Perangkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 yang disusun melalui berbagai tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, reviu dan rancangan akhir Renstra Perubahan dan nantinya diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD Perubahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Perubahan menjadi Rancangan Akhir Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022. Tujuannya adalah untuk mempertajam dan menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan.

Atas dasar itu, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggung jawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggung jawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggung jawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan melalui Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahun.